



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	15
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Dharmasraya Raih Opini WTP Ketujuh

Dharmasraya, Padek— Pemkab Dharmasraya raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan daerah. Prestasi ini merupakan yang ketujuh kalinya. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat, Yusnadewi di gedung BPK Sumbar, Rabu (26/4).

Bupati Dharmasraya Sutan Riska mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun 2021. Sehingga hasil yang diperoleh sangat memuaskan. Bupati mengucapkan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat, Yusnadewi atas penyerahan LHP BPK

atas pemeriksaan LKPD tahun 2021.

Pemeriksaan ini merupakan amanah yang diberikan kepada BPK-RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Harapan kami pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sumatera Barat untuk tahun ini akan memperoleh opini terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkap Sutan Riska.

Ia mengatakan, BPK perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan fungsinya, bukan hanya

memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Tapi juga memeriksa kinerja atas efektifitas tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Kegiatannya meliputi identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional oleh Auditor BPK. Berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, akuntabilitas keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan pada semua tingkatan unit institusi penyelenggara pemerintah.

Outputnya untuk perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan

pembangunan di daerah.

“Namun kami menyadari tentu masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, melalui pemeriksaan ini kami berharap bersama BPK-RI. Kami dapat pengelolaan keuangan, dan sesegera mungkin melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja agar semakin efektif dan efisien. Sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah kabupaten/kota, yang pada gilirannya mampu meningkatkan kualitas hidup di segala bidang bagi masyarakat lebih baik lagi,” bebernyanya lagi. **(ita)**